



LAPORAN KINERJA

2016

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
SETJEN DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	6
III.	AKUNTABILITAS KINERJA	9
IV.	PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Disamping itu, setiap Anggota DPR mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR RI tersebut, Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 23 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang didalam tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Adapun tugas dari Setjen DPR RI adalah menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR RI. Dukungan keahlian Setjen DPR RI disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPR RI di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Sekretaris Jenderal merupakan koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI. Dalam pelaksanaannya, Sekjen dibantu dua Deputi yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda yang membawahi berbagai biro-biro, salah satu deputi yaitu Deputi bidang Persidangan yang membawahi Biro Kerja Sama Antar Parlemen (Biro KSAP).

Untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, telah dibentuk berbagai peraturan seperti Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Sekjen DPR RI No. 400 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Setjen DPR RI yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekjen No. 3 Tahun 2010 dan diperbaharui lagi dengan peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dimana Biro Kerja Sama Antar

Parlemen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Persidangan. Dari beberapa peraturan tersebut, dikemukakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerinah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kerja Sama Antar Parlemen tahun 2016 dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen di masa yang akan datang.

B. KELEMBAGAAN

1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/Sekjen/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 3/PERSEKJEN/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Sekjen Nomor 6 Tahun 2015, Biro Kerja Sama Antar Parlemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Persidangan.

2. TUGAS POKOK

Biro Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;

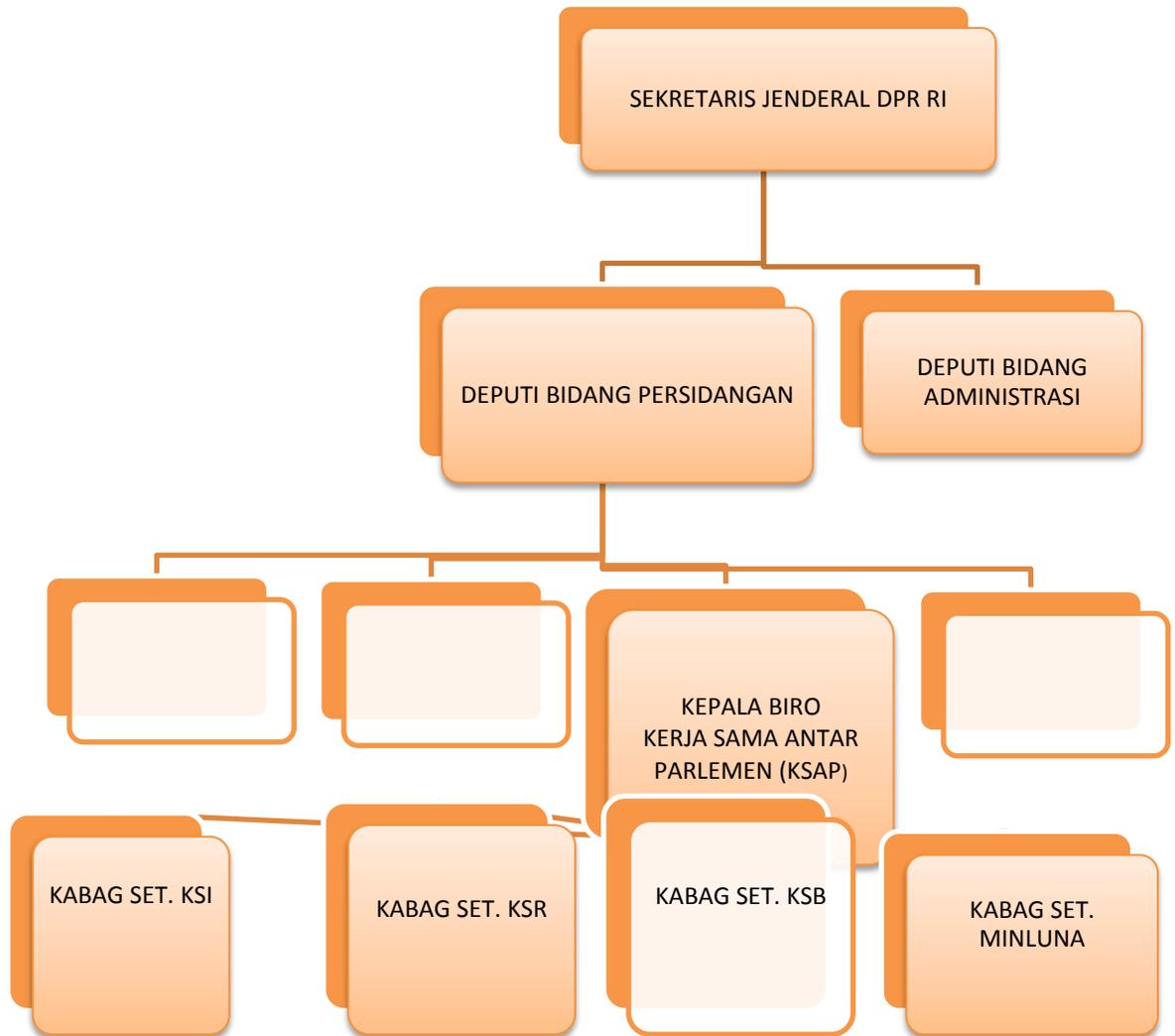
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Kerja Sama Antar Parlemen;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
- g. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi internasional dan dukungan analisis terhadap isu internasional;
- h. Penyelenggaraan persidangan kerjasama organisasi regional dan dukungan analisis terhadap isu regional;
- i. Penyelenggaraan persidangan kerjasama bilateral dan dukungan analisis terhadap isu bilateral;
- j. Penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan luar negeri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- k. Penyelenggaraan dukungan alih bahasa;
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m. Penyusunan laporan kinerja Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dibantu oleh :

1. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Internasional (KSI).
2. Bagian Sekretariat Kerjasama Organisasi Regional (KSR);
3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral (KSB);
4. Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota (MINLUNA).

D. BAGAN ORGANISASI BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan laporan pencapaian kinerja Biro KSAP selama tahun 2016. Capaian kinerja 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP Biro KSAP adalah sebagai berikut :

- Bab I** **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan struktur organisasi.
- Bab II** **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PENETAPAN KINERJA**
Menjelaskan Rencana Strategis Biro KSAP tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.
- Bab III** **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menjelaskan analisis pencapaian kinerja (mikro) Biro KSAP dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.
- Bab IV** **PENUTUP**
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas Kinerja Biro KSAP tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Biro Kerja Sama Antar Parlemen pada tahun 2016, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI, program kerja Biro KSAP mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Rumusan visi dan misi Biro Kerja Sama Antar Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu menyiapkan dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang Persidangan dan Kerja Sama antar Parlemen, sehingga visi Biro KSAP adalah:

**”TERWUJUDNYA DUKUNGAN KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN YANG
BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”**

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro KSAP, yaitu:

- a. Mewujudkan analisis isu-isu bilateral, yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat, serta alih bahasa yang akurat.

- b. Mewujudkan analisis isu-isu regional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- c. Mewujudkan analisis isu-isu internasional yang berkualitas dan akuntabel serta dukungan teknis dan administrasi yang cepat dan tepat.
- d. Mengembangkan Database yang akurat dan informasi terbaru untuk mendukung kegiatan kerja sama antar parlemen.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan hasil analisis isu-isu bilateral, regional dan internasional yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dan fungsi BKSAP.
- b. Meningkatkan dukungan teknis, administrasi dan alih bahasa yang berkualitas dan tepat waktu.

Dengan mengacu pada tujuan tersebut, Biro KSAP dapat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Biro KSAP terbagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan anggaran satker setjen yaitu :

“Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Antar Parlemen”

Dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP) sebanyak 4 dokumen
 2. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Internasional sebanyak 5 dokumen
 3. Jumlah Materi Kerja Sama Organisasi Regional sebanyak 5 dokumen
 4. Jumlah Materi Kerja Sama Bilateral sebanyak 5 dokumen
- Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota sebanyak 5 dokumen

Sementara untuk sasaran yang menggunakan satker dewan adalah :

- 1) Layanan Sidang/Konferensi di dalam negeri. Dengan indikator : jumlah penyelenggaraan konferensi/seminar regional/internasional sebanyak 3 kali

- 2) Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri. Dengan indikator : jumlah keikutsertaan DPR RI di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen sebanyak 50 kali.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Biro KSAP telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Perjanjian kinerja Biro KSAP disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Substansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja adalah memuat sasaran-sasaran strategis Deputi Persidangan tahun 2015-2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Berdasarkan Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2016 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Materi Kerjasama Anta Parlemen, telah dilaksanakan dengan pencapaian 100% yang terdiri dari :
 - a. Jumlah bahan kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen, sesuai target sebanyak 4 dokumen
 - b. Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional, sesuai target sebanyak 5 dokumen
 - c. Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional, sesuai target sebanyak 5 dokumen
 - d. Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota, sesuai target sebanyak 5 dokumen.
2. Layanan Sidang/Konferensi di Dalam Negeri, dengan indikator kinerja jumlah penyelenggaraan Konferensi/Seminar Regional/Internasional dengan target sebanyak 3 kali tidak terlaksana seluruhnya. Dari 3 target yang direncanakan hanya terlaksana satu kali kegiatan.
3. Layanan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri, dengan indikator kinerja jumlah keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen, dengan target 50 kali, telah terlaksana melebihi targetnya yaitu 61 kali pengiriman delegasi

B. EVALUASI KINERJA

Analisis capaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran dan kegiatannya. Oleh karena itu analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun indikator dan capaian kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen (KSAP)	4 Dokumen	4 dokumen	100%
Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional	5 dokumen	5 dokumen	100%
Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional	5 dokumen	5 dokumen	100%
Jumlah Materi Kerjasama Bilateral	5 dokumen	5 dokumen	100%
Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	5 dokumen	5 dokumen	100%
Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/Seminar Regional/Internasional	3 kali	1 kali	33,3%
Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen	50 kali	61 kali	122%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran berdasarkan output yang dihasilkan di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jumlah Bahan Kebijakan Biro Kerjasama Antar Parlemen dari 4 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 4 dokumen yang terdiri dari : Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran, LAKIP dan Dokumen Kebijakan Biro KSAP, sehingga capaian adalah 100%.

Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Internasional dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari 5 laporan kegiatan per masa persidangan, sehingga capaian adalah 100%.

Jumlah Materi Kerjasama Organisasi Regional dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari 5 laporan kegiatan per masa persidangan, sehingga capaian adalah 100%.

Jumlah Materi Kerjasama Bilateral dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari 5 laporan kegiatan per masa persidangan, sehingga capaian adalah 100%.

Jumlah Materi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dari 5 dokumen yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari 5 laporan kegiatan per masa persidangan, sehingga capaian adalah 100%.

Jumlah Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar Regional/Internasional, dari 3 kali yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 1 (satu) kali sehingga capaian adalah 33,3%

Jumlah Keikutsertaan DPR di Organisasi Regional/Internasional dalam rangka diplomasi parlemen, dari 50 kali yang ditargetkan, terealisasi sebanyak 61 kali kunjungan, sehingga capaian adalah 122%

Rincian dari kegiatan dukungan Biro Kerjasama Antar Parlemen yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya kegiatan Kerjasama Parlemen Internasional (KSI) dengan baik dan lancar, termasuk didalamnya pengiriman delegasi-delegasi menghadiri berbagai sidang internasional ke berbagai negara, yaitu:

NO.	KEGIATAN
1	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>the 11th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Other Related Meetings</i> di Baghdad, Irak , tgl 20 s.d. 27 Januari 2016
2	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang " <i>4th OECD Parliamentary Days</i> " di Paris, Perancis , tgl 2 s.d. 7 Februari 2016
3	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang " <i>Parliamentary Hearing at the United Nations</i> " di New York, Amerika Serikat , tgl 6 s.d. 11 Februari 2016
4	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang " <i>Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO</i> " di Brussels, Belgia , tgl 15 s.d. 19 Februari 2016
5	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>OECD "Improving Women's Access to Leadership"</i> di Perancis , tgl 5 s.d. 10 Maret 2016
6	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>IPU "the 134th Assembly of the Inter-Parliamentary Union and Related Meetings"</i> di Lusaka, Zambia , tgl 16 s.d. 24 Maret 2016
7	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>Global Parliamentary Conference (GPC)</i> di Washington, USA , tgl 8 s.d. 14 April 2016
8	Kunjungan Panja BKSAP DPR RI ke Norwegia tgl 18 s.d. 24 April 2016
9	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>WIP Global Forum Summit 2016</i> di Amman, Yordania tgl 2 s.d. 6 Mei 2016
10	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Konferensi <i>Anti-Corruption Summit</i> di London, Inggris tgl 10 s.d. 14 Mei 2016

11	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>the Forum</i> di Melbourne, Australia tgl 19 s.d. 23 Mei 2016
12	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang " <i>Parliamentary Session During the 69th World Health Assembly (WHA)</i> " di Jenewa, Swiss tgl 25 s.d. 28 Mei 2016
13	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>the 2016 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO</i> di Jenewa, Swiss tgl 11 s.d. 16 Juni 2016
14	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang IPU " <i>World e-Parliament Conference 2016</i> " di Vapariaso, Chili tgl 26 Juni s.d. 2 Juli 2016
15	Delegasi DPR RI menghadiri Sidang <i>IDEA'S Annual Democracy Forum 2016</i> di Kota Ulaanbataar, Mongolia tgl 23 s.d. 27 Agustus 2016
16	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>Global Green Growth Week (GGGW)</i> di Jeju, Korea Selatan tgl 4 s.d. 10 September 2016
17	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang " <i>the Annual WTO Public Forum 2016</i> " di Jenewa, Swiss tgl 25 s.d. 30 September 2016
18	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>MENA - OECD Governance Forum</i> di Tunis, Tunisia tgl 1 s.d. 6 Oktober 2016
19	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang " <i>the 2016 MIKTA Speakers Consultation</i> " di Hobart, Australia tgl 3 s.d. 8 Oktober 2016
20	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>OECD, Global Parliamentary Network 2016</i> di Paris, Perancis tgl 10 s.d. 14 Oktober 2016
21	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang IPU <i>the 135th Assembly of the Inter-Parliamentary Union & Related Meetings</i> di Jenewa, Swiss tgl 21 s.d. 28 Oktober 2016

22	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang IAVE "the 2016 International Association For Social Volunteer Conference" di Mexico City, Meksiko, tgl 4 - 9 November 2016
23	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang Parliamentary Meeting on the Occasion of the United Nations Climate Change Conference di Marrakech, Maroko, tgl 11 S.D. 16 November 2016
24	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri penyelenggaraan Parliamentary Forum at the Second High Level Meeting of the Global Partnership for effective Development Cooperation di Nairobi, Kenya, tgl 27 November s.d. 2 Desember 2016
25	Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke United Kingdom & Wales tgl 27 November s.d. 3 Desember 2016
26	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri sidang 17th Internasional Anti Corruption Conference (IAAC) di Panama tgl 30 November s.d. 4 Desember 2016
27	Delegasi Setjen DPR RI ke Sidang IPU <i>Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)</i> di Lusaka, Zambia, tgl 16 s.d. 24 Maret 2016.

2. Terselenggaranya kegiatan Kerjasama Parlemen Regional (KSR) dengan baik dan lancar, termasuk didalamnya pengiriman delegasi-delegasi menghadiri berbagai sidang regional ke berbagai Negara, yaitu:

NO.	KEGIATAN
1	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>the 22th Annual Meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)</i> di Vancouver, Kanada , tgl 16 s.d. 21 Januari 2016
2	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>the 1st Meeting of Speakers of EURASIA Countries Parliaments</i> di Moscow, Rusia tgl 18 s.d. 24 April 2016

3	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) Meeting</i> di Ulanbator, Mongolia tgl 18 s.d. 24 April 2016
4	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs Meeting</i> di Teheran, Iran tgl 25 s.d. 29 April 2016
5	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>APA Standing Committee on Political Affairs Meeting</i> di Amman, Yordania , tgl 31 Mei s.d. 4 Juni 2016
6	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs</i> di Islamabad, Pakistan tgl 25 s.d. 29 Juli 2016
7	Delegasi DPR RI ke Sidang <i>the 8th ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus</i> di Luang Prabang, Laos tgl 8 s.d. 12 Agustus 2016
8	Kunjungan Kerja BKSAP dalam rangka menindaklanjuti resolusi-resolusi AIPA terkait <i>ASEAN Economic Community</i> ke Brussel, Belgia , tgl 28 Agustus s.d. 2 September 2016
9	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>AIPA Preparatory Meeting and Meeting with the ASEAN Heads of Government/State During the 28th ASEAN Summit</i> di Vientiane, Laos tgl 4 s.d. 7 September 2016
10	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>APA Standing Committee on Staff and Financial Regulations and 1st Executive Council Meeting</i> di Phnom Penh, Kamboja tgl 25 s.d. 28 September 2016
11	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang <i>AIPA</i> di Kota Nyi Pyi Taw, Myanmar tgl 29 September s.d. 3 Oktober 2016
12	Kunjungan Kerja BKSAP dalam rangka menindaklanjuti resolusi-resolusi AIPA terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN ke Frankfurt dan Berlin, Jerman tgl 16 s.d. 21 Oktober 2016
13	Delegasi DPR RI dalam rangka menghadiri Sidang Pleno ke-9 APA di Siem Reap, Kamboja , 27 November s.d. 2 Desember 2016

3. Terselenggaranya kegiatan Kerja Sama Bilateral (KSB) dengan baik dan lancar, termasuk dalamnya pengiriman delegasi Teknis BKSAP, Delegasi GKSB DPR RI ke Parlemen negara sahabat, penerimaan tamu (*friendly talk*), sebagai berikut :

A. PENGIRIMAN DELEGASI TEKNIS BKSAP

NO	KEGIATAN
1.	Kunjungan teknis BKSAP ke Polandia dipimpin oleh Ibu Dr. Nurhayati Ali Assegaf (19-24 November 2016).
2.	Kunjungan teknis BKSAP ke Zimbabwe dipimpin oleh Bapak H. Rofi' Munawar, Lc (4-10 Desember 2016)
3.	Kunjungan teknis BKSAP ke Kazakshstan dipimpin oleh Bapak H. Syaifulah Tamliha (2-7 Desember 2016)

B. PENGIRIMAN DELEGASI GKSB

NO	KEGIATAN
1.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Peru ke Peru, tanggal 23 – 29 Januari 2016
2.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Thailand ke Thailand, tanggal 7 – 13 Februari 2016
3.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Mongolia ke Mongolia, tanggal 20 - 26 Februari 2016
4.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kosta Rika ke Kosta Rika, tanggal 29 Feb - 6 Maret 2016
5.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Meksiko ke Meksiko, tanggal 3 - 9 Maret 2016
6.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain ke Bahrain, tanggal 5 – 11 Maret 2016
7.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Chile ke Chile, tanggal 10 – 16 April 2016
8.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Jepang ke Jepang, tanggal 10 – 16 April 2016
9.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kanada ke Kanada, tanggal 9 - 15 Mei 2016
10.	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Republik Rakyat Tiongkok ke RRT, tanggal 18 – 24 Mei 2016

11.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Tunisia ke Tunisia, tanggal 20 – 26 Mei 2016
12.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Kroasia ke Kroasia, tanggal 23 – 29 Mei 2016
13.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Maroko ke Maroko, tanggal 29 Mei – 4 Juni 2016
14.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Yunani ke Yunani, tanggal 29 Mei – 4 Juni 2016
15.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Bulgaria ke Bulgaria, tanggal 12 – 18 Juli 2016
16.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Palestina ke Jordania, tanggal 17 – 23 Juli 2016
17.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Argentina ke Argentina, tanggal 20 – 26 Agustus 2016
18.	Kunjungan GKSDB DPR RI – Parlemen Ekuador ke Ekuador, 2 – 8 Oktober 2016

C. PENERIMAAN TAMU (*FRIENDLY TALK*) DELEGASI PARLEMEN NEGARA SAHABAT DAN COURTESY CALL DENGAN DUTA BESAR NEGARA SAHABAT

- 1) *Courtesy Call* Ketua BKSAP dengan Duta Besar Azerbaijan, H.E. Tamerlan Garayev, 26 Januari 2016
- 2) *Courtesy Call* Ketua BKSAP dengan Duta Besar Turki, H.E. Zekeriya Akcam, 27 Januari 2016
- 3) *Courtesy Call* GKSDB Hongaria dengan Duta Besar, H.E. Judith Nemec Pac, 16 Februari 2016
- 4) *Courtesy Call* Ketua BKSAP dengan Duta Besar Pakistan, H.E. Mr. Mohammad Aqil Nadeem, 25 Februari 2016
- 5) *Courtesy Call* GKSDB Tunisia dengan Duta Besar Tunisia, H.E. Mourad Belhassen, Kamis 10 Maret 2016
- 6) *Courtesy Call* Ketua BKSAP dengan Duta Besar Norwegia, Mr. Stig Traavik, Selasa 15 Maret 2016
- 7) *Friendly Talk* GKSDB Mongolia dengan Anggota Parlemen Mongolia, yang dipimpin oleh Mr. Sodnomzundui Erdene, Rabu 30 Maret 2016
- 8) *Courtesy Call* Ketua BKSAP dengan Dubes Ekuador, H.E. MR. Rodrigo Riofrio
- 9) *Friendly Talk* GKSDB Perancis dengan Delegasi Parlemen Perancis yang dipimpin oleh Senator Jazques Gautier, Selasa, 19 April 2016
- 10) *Courtesy Call* dengan Dubes Maroko, H.E. Mohammad Majdi, 25 April 2016
- 11) *Courtesy Call* GKSDB Venezuela dengan Dubes Venezuela, H.E. Mdm. Gladys Francisca Urbaneja Duran, 26 April 2016
- 12) *Courtesy call* Ketua BKSAP dengan Dubes Uzbekistan , H.E. Shavkat Jamolov. 26 April 2016

- 13) *Courtesy Call* GKS B Kroasia dengan Dubes Kroasia, H.E. Mr. Drazen Margeta, 28 April 2016
- 14) *Courtesy call* dengan Dubes Iran, HE. Valiollah M. Nasrabadi, Rabu 4 Mei 2016
- 15) *Courtesy call* Ketua BKSAP dengan Duta Besar Tunisia, H.E. M. Belhanem Rabu 18 Mei 2016
- 16) *Courtesy call* dengan Dubes Georgia H.E Zurab Aleksidze Senin 18 Juli 2016
- 17) *Courtesy call* dengan Dubes Ethiopia H.E Mr. Arega Hailu Teffera, Selasa 19 Juli 2016
- 18) *Friendly talk* dengan Delegasi National Defence College (NDC) Bangladesh, Rabu 31 Agustus 2016
- 19) *Courtesy call* Ketua BKSAP dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Ekuador Ms. Maria Augusta Velasco, Selasa 27 September 2016
- 20) *Courtesy call* Ketua BKSAP dengan Dubes Yunani, Georgios Dogoritis, Senin 10 Oktober 2016
- 21) *Courtesy call* Ketua BKSAP dengan Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend, Senin, 10 Oktober 2016
- 22) *Friendly talk* dengan Sekjen AIPA, Isra Sunthornvut, Senin 10 Oktober 2016
- 23) *Friendly talk* dengan Delegasi Parlemen Jerman, yang dipimpin oleh Dr. Thomas Gambke, Senin 10 Oktober 2016
- 24) *Friendly Talk* dengan Delegasi Parlamento Nacional Republica Democratica de Timor-Leste, Kamis 20 Oktober 2016
- 25) *Courtesy call* GKS B DPR RI – Parlemen Kuba dengan Dubes Kuba, Mrs. Nirsia Castro Guevara, Kamis 27 Oktober 2016
- 26) *Courtesy Call* Ketua BKSAP dengan Menteri Pertahanan Yunani, Mr. H.E. Panagiotis Kammenos, 3 November 2016
- 27) *Courtesy call Wakil Ketua BKSAP dengan Duta Besar Zimbabwe, Mrs. Alice Mageza, Kamis, 1 Desember 2016*

4 Terselenggaranya kegiatan Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota yang terdiri dari pengiriman delegasi Anggota Individu ke berbagai negara, kunjungan sosialisasi Pimpinan BKSAP serta kegiatan penerjemahan, sebagai berikut :

A. Dukungan Administrasi Kunjungan Individu Anggota

NO	KETERANGAN
1	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Dodi Reza Alex Noerdin (PG) ke Johannesburg, Afsel tgl 1 s.d. 7 Mei 2016

2	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Erma Suryani Ranik, CS (PD) ke Washington, Amerika tgl 14 s.d. 20 Mei 2016
3	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Hj. Kasriyah, CS (PPP) ke Baku, Azerbaijan tgl 18 s.d. 24 Mei 2016
4	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Mukhlisin dan Moh. Arwani Thomafi, CS (PPP) ke Astana, Kazakhstan tgl 29 Mei s.d. 4 Juni 2016
5	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Dimiyati Natakusuma, CS (PPP) ke Washington, Amerika tgl 16 s.d. 22 Agustus 2016
6	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Ahmad Farial dan H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H., CS (PPP) ke Buenos Aires, Argentina tgl 20 s.d. 26 Agustus 2016
7	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. H. Ahmad Muzani, CS (P.Gerindra) ke New Delhi, India tgl 27 Agustus s.d. 2 September 2016
8	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. H. Andhika Hazrumy, S.Sos., M.AP., CS (F-PG) ke Canberra, Australia tgl 4 s.d. 10 September 2016
9	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Ir. Alimin Abdullah, CS (10 orang Anggota F-PAN) ke Buenos Aires, Argentina tgl 17 s.d. 23 September 2016
10	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Hj. Siti Mufattahah, P.Si., MBA. (F-PD) ke Paris, Perancis tgl 5 s.d. 11 Oktober 2016
11	Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. Romahurmuzy, CS (3 org F-PPP) ke Washington DC, Amerika Serikat tgl 7 s.d. 13 November 2016
12	Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. Dr. Sukamta, CS (4 org F-PKS) ke London, Inggris tgl 13 s.d. 19 November 2016
13	Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. M. Aziz Syamsuddin, CS (F-PG) ke Washington DC, Amerika Serikat tgl 13 s.d. 19 November 2016
14	Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. Hj. Melani Leimena, CS (9 org F-PD) ke Moskow, Rusia tgl 13 s.d. 19 November 2016

15	Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. Hj. Ida Fauziyah, CS (10 org F-PKB) ke Aljer, Aljazair tgl 15 s.d. 21 November 2016
16	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Tantowi Yahya, CS ke Washington DC, Amerika Serikat tgl 18 s.d. 24 november 2016
17	Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn., CS (4 org F-P.Nasdem) ke Canberra, Australia tgl 20 s.d. 26 November 2016
18	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si., CS (4 org F-PKS) ke Amerika Serikat tgl 28 November s.d. 4 Desember 2016
19	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Drs. Akbar Faizal (F-P.Nasdem) ke Moskow, Rusia tgl 28 November s.d. 2 Desember 2016
20	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. H. Mahyudin, S.T., M.M., CS (3 org F-PG) ke Zagreb, Kroasia tgl 30 November s.d. 6 Desember 2016
21	Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Zulfan Lindan, CS (2 org F-P.Nasdem) ke Brasilia, Brazil, tgl 13 s.d. 19 Desember 2016

B. Sosialisasi Kunjungan Individu

NO	KETERANGAN
1	Sosialisasi kunjungan individu Anggota DPR RI di Praha, Republik Ceko, tgl 22 s.d. 28 Oktober 2016
2	Sosialisasi kunjungan individu Anggota DPR RI di Washington DC, Amerika Serikat tgl 7 s.d. 13 November 2016
3	Sosialisasi kunjungan individu Anggota DPR RI di London, Inggris tgl 13 s.d. 19 November 2016
4	Sosialisasi kunjungan individu Anggota DPR RI di San Francisco, Amerika Serikat tgl 13 s.d. 19 November 2016

5	Sosialisasi Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. H. Syaifullah Tamliha, CS (Wk. Ketua BKSAP/F-PPP) ke Canberra, Australia tgl 20 s.d. 26 November 2016
6	Sosialisasi Kunjungan Individu Anggota DPR RI a.n. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., CS (Ketua BKSAP dan 3 org Anggota) ke Astana, Kazakhstan tgl 7 s.d. 13 Desember 2016
7	Sosialisasi Kunjungan individu Anggota DPR RI a.n. H. Syaifullah Tamliha, CS (Wk. Ketua BKSAP/F-PPP bersama Pimpinan Fraksi2) ke Riyadh, Arab Saudi tgl 21 s.d. 25 Desember 2016

C. Pelaksanaan Kegiatan Alih Bahasa/Penerjemahan

1) Kegiatan Penerjemahan Tertulis

No	Jenis teks	Jumlah teks	Keterangan
1	dokumen bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya seperti : buku, pidato, Laporan, surat-surat dari negara lain, surat Indonesia-Inggris, MoU, <i>Agreed Minutes of Meeting</i> , <i>Joint Statement</i> , <i>Term of References</i> , terjemahan produk hukum, terjemahan ilmiah, terjemahan presentasi dan CV Indonesia-Inggris	544 dokumen dan Surat	Dari masing-masing dokumen dan surat bervariasi jumlah halamannya, mulai dari 1 lembar sampai puluhan halaman, bahkan ratusan halaman. Untuk yang sudah ratusan halaman dilakukan <i>outsourcing</i> , Penerjemah Muda hanya melakukan <i>editing</i> dari penerjemah luar.

2) Kegiatan Penerjemahan Lisan

No.	Jenis	Jumlah acara/hari
	Terjemahan lisan teknik konsekutif dan simultan	
1	Menerima tamu-tamu asing dengan rincian: bahasa berbahasa Arab dan bahasa Inggris,	86 Acara
	a. Penerjemahan lisan berbahasa Arab	2 acara

No.	Jenis	Jumlah acara/hari
	b. Penerjemahan lisan berbahasa Inggris	84 acara

Berdasarkan evaluasi kinerja di Biro Kerja Sama Antar Parlemen dalam tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2016 semua kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif pada visi dan misi Biro KSAP. Namun, mengingat kegiatan Sekretariat Jenderal DPR sangat tergantung pada kegiatan Dewan, tentunya seluruh kebijakan/keputusan yang diambil oleh Pimpinan/Anggota Dewan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang dampaknya akan tergambar pada kinerja Sekretariat.

Untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya maka Biro KSAP lebih mengintensifkan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk mengedepankan profesionalisme kerja dan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan kinerja Biro KSAP dapat meningkat.

C. ASPEK KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro KSAP ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016. Dari DIPA tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro KSAP melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja. Selanjutnya, kembali lagi ke tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu sebagai Sekretariat yang memberikan dukungan terhadap tiga fungsi Dewan, maka penggunaan anggaran juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan DPRRI.

Pagu anggaran yang dikelola oleh BKSAP adalah sebesar **Rp.157.915.572.000,- kemudian mengalami pengurangan menjadi Rp. 151.915.572.000,-**. Realisasi dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar **Rp.101.378.486.407,-** atau **66,73%**. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan sidang/Konferensi Internasional di dalam negeri terdiri dari :

Penyelenggaraan Workshop *Global Organization of Parliamentarians againts Corruption* (GOPAC), tanggal 6 – 8 Oktober 2016 di Jakarta.

b. Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar negeri terdiri dari :

1. Pelaksanaan Tugas Organisasi Parlemen Internasional.
2. Pelaksanaan Tugas Organisasi Parlemen Regional.
3. Pelaksanaan Tugas Desk Kerja Sama Bilateral.
4. Pelaksanaan Panja BKSAP
5. Kunjungan Kerja LN Anggota DPR RI dalam rangka Peran Diplomasi

Selain penggunaan Anggaran dengan Satuan Kerja Dewan sebagaimana tersebut diatas, kinerja Biro Kerjasama Antar Parlemen juga didukung oleh Anggaran dengan Satuan Kerja Sekretariat yang berjumlah **Rp. 1.333.856.000,-**

Dari jumlah tersebut **teralisasi sebesar Rp. 536.237.600,- atau 40,20 %** yang dipergunakan untuk kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Biro KSAP
2. Fasilitasi Kerjasama Organisasi Internasional, Regional, Bitateral dan Fasilitasi Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota

Anggaran tidak terserap 100% karena ada perubahan kebijakan yang mengakibatkan beberapa kegiatan Dewan yang tidak terlaksana misalnya penyelenggaraan sidang SDGs yang semula direncanakan akan diselenggarakan di Bali. Persiapan kegiatannya sudah dilaksanakan oleh Sekretariat sehingga hal tersebut tidak mengurangi kinerja Biro KSAP dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPR-RI.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro KSAP tahun 2016 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan kepada Anggota Dewan untuk lebih baik lagi. Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang dicapai antara lain:

1. Meningkatnya kuantitas bahan-bahan terkait dengan substansi mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional;
2. Meningkatnya kuantitas dukungan kegiatan kerjasama antar parlemen;
3. Meningkatnya kuantitas pelaksanaan alih bahasa/penerjemahan;
4. Meningkatnya kuantitas dukungan kepada DPR RI dalam pelaksanaan kunjungan individu Anggota DPR RI dalam rangka diplomasi parlemen

B. HAMBATAN DAN MASALAH

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Biro KSAP telah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada DPR RI, khususnya kepada Pimpinan dan Anggota BKSAP. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain:

- kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pegawai
- dukungan teknologi dan sarana/prasarana yang kurang memadai

Hal tersebut terkait erat dengan tugas dan fungsi Biro KSAP yang harus bisa melakukan analisis terhadap isu-isu bilateral/regional/internasional; memberikan dukungan maksimal untuk persidangan di dalam maupun di luar negeri; serta dukungan

penerjemahan baik lisan maupun tertulis, sehingga membutuhkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dengan baik serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik.

Hal lain yang menjadi kendala adalah dinamika politik di DPR RI sehingga seringkali kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga dalam memberikan pelayanan seringkali menemui kendala baik di bidang substansi maupun teknis, terutama sekali dalam hal pengiriman delegasi ke luar negeri maupun penerimaan tamu-tamu delegasi dari parlemen luar negeri, atau pembatalan kunjungan ke luar negeri maupun pembatalan kunjungan tamu yang akan datang yang pemberitahuannya begitu singkat menjelang pelaksanaan kegiatan.

Biro KSAP juga telah mengupayakan berbagai peningkatan dalam kualitas pelayanan sehingga secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Biro KSAP tahun 2016 dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Meskipun demikian hasil yang diperoleh masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal guna merespons tuntutan pelayanan kepada Anggota DPR-RI yang semakin hari semakin tinggi. Hasil yang diperoleh ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan seluruh unit kerja di jajaran Biro KSAP.

C. PEMECAHAN MASALAH

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi perlu dilakukan dengan cara:

1. Penempatan staf yang tepat sesuai antara latar belakang pendidikan maupun ketrampilan dengan tugas pokok dan fungsi BKSAP
2. Peningkatan kuantitas SDM yang memiliki penguasaan substansi tentang isu – isu Hubungan Internasional baik bilateral, regional maupun internasional,serta melalui diklat/sekolah khususnya penerjemahan;
3. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, misalnya penyiaran informasi terbaru tentang BKSAP melalui web site DPR RI baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia;
4. Peningkatan sarana/prasarana yang memadai dan modern untuk menunjang seluruh kegiatan di BKSAP.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro KSAP tahun 2016 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2017

**Kepala Biro
Kerja Sama Antar Parlemen,**

**Endah T.D. Retnoastuti
NIP 19680402 199302 2 001**

